

## Demokrasi lokal dan korupsi: Relasi ekonomi-politik dalam kasus korupsi Walikota Kota Batu

Ali Fikri Hamdhani<sup>1, a\*</sup>, Ahmad Adi Susilo<sup>2, b</sup>

<sup>1</sup> Malang Corruption Watch (MCW). Jl. Joyosuko Metro No. 42a, Kota Malang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Brawijaya. Jl. Veteran No.10-11, Kota Malang, 65145, Indonesia

<sup>a</sup> [fikrihamdan737@gmail.com](mailto:fikrihamdan737@gmail.com); <sup>b</sup> [ahmadadi353@gmail.com](mailto:ahmadadi353@gmail.com)

\*Corresponding Author

**Abstrak:** Era demokrasi lokal melalui desentralisasi tidak menjamin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi berkurang. Cara pandang *good governance* menjadi pandangan umum dalam tata kelola pemerintahan daerah, mengabaikan aspek struktural hingga menyebabkan kontradiksi dasar dalam lokalisasi kekuasaan. Kebangkitan politik lokal era reformasi menjadi upaya reorganisasi kekuatan elit lama yang berpengaruh sejak orde baru. Penelitian ini menggunakan konsep lokalisasi sebagai arena baru bagi elite penguasa dan pengusaha lokal yang memainkan peran utama dalam kontestasi kekuasaan dan kekayaan. Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif, memfokuskan analisis pada praktik korupsi Eddy Rumpoko sebagai Walikota kota batu selama dua periode dari 2007 hingga 2017. Data dikelompokkan menjadi data primer yang diperoleh melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi Eddy Rumpoko. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal, media, dan dokumen lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan korupsi di kota batu merupakan bentuk dari kepentingan aliansi ekonomi-politik lokal, khususnya bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang industri pariwisata, hotel, villa atau perumahan dan konstruksi bangunan. Mereka mendapatkan kemudahan berbisnis sejak masa Eddy Rumpoko dengan mobilisasi birokrat, sementara Eddy Rumpoko mampu mempertahankan kuasa politiknya melalui bantuan para pengusaha.

**Kata Kunci:** demokrasi lokal; korupsi; kota batu; ekonomi-politik

**How to Cite:** Hamdhani, A. F., & Susilo, A. A. (2024). Local democracy and corruption: Economic-political relations in the corruption case of Batu City's Mayor. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 95-106. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1139>



### Pendahuluan

Tahun 2004 merupakan era desentralisasi atau otonomi daerah, yang merupakan salah satu target perubahan di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Hal ini sebagai upaya pemberantasan korupsi melalui kerangka *good governance* (Kholik, 2017). Desentralisasi kenyataannya tidak memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi, sebaliknya, yang muncul adalah “raja-raja kecil” yang memanfaatkan daerah sebagai ladang korupsi (Guntara, 2020). Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sepanjang 2004 hingga 2022 telah menangani 1.351 kasus korupsi (KPK, 2023). Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan perkara suap dan gratifikasi, berkaitan dengan pengurusan izin, pengadaan barang dan jasa, dan urusan mutasi atau demosi jabatan (Annur, 2022). Adapun berdasarkan aktor, mayoritas pelaku korupsi terjadi di lingkungan pemerintah daerah, sejak tahun 2004 hingga 2022 ada setidaknya 22 Gubernur dan 148 Bupati/Wali Kota yang ditindak KPK (Zabar & Topan, 2022).

Budi Setiyono menunjukkan pola dan modus korupsi di daerah, faktornya beragam mulai dari faktor moral, birokrasi yang berbelit, persaingan politik, dan lemahnya penegakan hukum. Budi menawarkan perlu ada formulasi alternatif kebijakan berdasarkan asas akuntabilitas dan partisipasi publik (Setiyono, 2017). Penelitian dengan pendekatan yang sama juga digunakan dalam studi kasus di Lampung Tengah, korupsi oleh kepala daerah dengan pihak swasta. Penelitiannya menitikberatkan pada prosedur administratif, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Fatkuroji & Meilinda, 2022). Melalui cara pandang *good governance*, korupsi dianggap sebagai fenomena ketidakpatuhan individu terhadap aturan dan institusi. Pendekatan ini memang paling umum digunakan dalam penelitian korupsi di Pemerintah Daerah pasca lengsernya Orde Baru. Namun, pada dasarnya pendekatan

ini bermotif ekonomi pasar bebas (*free market neoliberalism*), cara pandang institusional yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan donor internasional di negara-negara berkembang (Triguswinri, 2021).

Pendekatan institusional seperti *good governance* mengabaikan aspek struktural, yakni relasi antara kepentingan ekonomi-politik yang juga memiliki pengaruh pada perilaku korupsi oleh elit politik dan ekonomi itu sendiri. Korupsi tidak hanya persoalan skandal hukum dan moralitas semata, korupsi dapat terjadi karena kondisi politik serta ekspansi ekonomi pasar kapitalis yang terjadi secara bersamaan. Di Indonesia, cara pandang struktural dalam melihat korupsi juga dijelaskan oleh Oley dan Adi (2018), mereka menunjukkan kegagalan sistem ekonomi pasar sehingga memungkinkan adanya korupsi, khususnya sektor pertambangan. Perilaku tersebut menjadi dampak dari praktik perburuan rente (*rent-seeking*) dan spekulasi atas harga suatu komoditas. Perburuan rente di Indonesia tampak jelas melalui *The Crony Capitalism Index*, indeks tersebut menilai seberapa banyak kebijakan negara hanya menguntungkan kelompok swasta. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia setelah berada di peringkat ke-7 di tahun 2016 (The Data Team, 2016). Relasi yang membentuk korupsi dapat dilihat melalui data korupsi yang ada, kelompok swasta dan pejabat publik menjadi aktor paling banyak yang terlibat. Dari total 1.442 pelaku korupsi sepanjang periode 2004-2022, ada 372 pelaku korupsi dari pihak swasta, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak, kemudian diikuti oleh pejabat publik sebagai pelaku terbanyak berikutnya (Kusnandar, 2022).

Kehadiran transisi demokrasi di sisi lain justru menjadi mekanisme baru untuk birokrasi sebagai mesin kekuasaan oleh sekelompok tertentu baik politisi-swasta dan para birokrat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Afala, 2017; As'ad et al., 2023). Struktur ekonomi-politik yang ada di Indonesia dikendalikan oleh kekuatan oligarki yang berpusat pada lingkaran kroni Orde Baru, kekuatan inilah yang mempengaruhi kebijakan publik, begitu pun di masa Reformasi. Di tengah kondisi menguatnya oligarki tersebut, akan menyempitkan ruang keterlibatan (*partisipasi*) bagi kelompok masyarakat (*civil society*) dalam tata kelola pemerintahan, bahkan cenderung menggunakan instrumen kekerasan terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya (Suryani et al., 2021). Kekuatan ini pada titik tertentu membuat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada lembaga kekuasaan menjadi semakin tidak terkendali.

Penelitian ini akan mengurai kondisi korupsi di salah satu daerah di Jawa Timur, yakni Kota Batu. Selama masa kepemimpinan Eddy Rumpoko, konfigurasi kekuasaan Kota Batu menjadi fenomenal, hal ini banyak terungkap ketika ia tertangkap oleh KPK. Eddy terjerat kasus korupsi dua kali, pertama terjadi di tahun 2017 akibat kasus suap, kemudian di tahun 2021 kembali terungkap kasus gratifikasi (Zuhad, 2021). Melalui kasus beruntun tersebut, relasi kepentingan ekonomi-politik Kota Batu semakin mudah untuk dilihat. Selama masa kepemimpinan Eddy Rumpoko, dinamika kekuasaan Kota Batu memang diwarnai dengan praktik kekuasaan oligarkis (Intrans Institute, 2017).

Fenomena oligarki di Kota Batu pernah ditulis dalam penelitian sebelumnya (Samsuddin et al., 2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kota Batu berbentuk oligarki yang bertipe penguasa kolektif sipil (sebuah bentuk tesis oligarki ala Winters), juga bertipe oligarki predatoris (bentuk tesis oligarki ala Robinson-Hadiz). Kekuatan oligarki tersebut memiliki relasi kuasa dengan ciri penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Penelitian tersebut menggabungkan dua teoritis oligarki sekaligus, Winters dan Vedi Hadiz, padahal keduanya menggunakan kerangka teoritis yang berbeda. Pendekatan yang berbeda ini memiliki implikasi pada bagaimana mendefinisikan oligarki itu sendiri, Vedi Hadiz mendefinisikan oligarki sebagai sistem relasi politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan serta otoritas dan perlindungan kolektifnya, sementara Winters mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan di antara aktor-aktor yang memiliki kekayaan tersebut (Mudhoffir et al., 2020). Penelitian Samsuddin mengungkap keterlibatan PT Batu Wisata Resources (BWR) dalam kasus korupsi yang menghapus beban pajak untuk kalangan para oligark, kasus ini terungkap di tahun 2013. Padahal di tahun berikutnya, relasi dengan kelompok pengusaha swasta lainnya semakin tampak jelas ketika Eddy Rumpoko terjerat kasus korupsi, ini yang tidak terlihat dalam penelitian tersebut.

Masalah di Kota Batu menunjukkan gejala kegagalan di era desentralisasi, dimana penguasa dan pengusaha lokal kerap kali memainkan sumber daya publik untuk kepentingan akumulasi

kekayaan semata. Penelitian ini akan banyak merujuk sebagaimana argumen yang disampaikan Vedi Hadiz (2022), untuk menganalisis munculnya gejala korupsi di Kota Batu. Menurut Hadiz, elit lokal sesungguhnya kurang berkepentingan dengan reformasi tata pemerintahan yang baik, bahkan dapat dikatakan bahwa dorongan reformasi untuk transparansi dan akuntabilitas bergerak secara diametral dengan kecenderungan predatorial para elit (Hadiz, 2022). Kebijakan desentralisasi yang kerap dikemas melalui gagasan tata pemerintahan yang baik, menunjukkan kegagalan untuk memahami ketegangan dan kontradiksi yang fundamental dalam lokalisasi kekuasaan yang berkaitan dengan masalah pembangunan, demokrasi serta partisipasi dan kontestasi politik (Hadiz, 2022).

Lebih lanjut Hadiz menggambarkan kondisi pokok tentang elit lokal di Indonesia sebagaimana berikut. *Pertama*, penggunaan politik uang dan berbagai instrumen mobilisasi dan intimidasi politik warisan Orde Baru juga digunakan untuk membangun dominasi atas demokrasi di tingkat lokal. Beberapa pemain politik yang relatif baru, termasuk kalangan reformis, juga terserap ke dalam logika politik uang dan pencarian rente untuk bisa bertahan secara politik (Hadiz, 2022). *Kedua*, diantara elit Orde Baru ini adalah birokrat lama yang berkeinginan mengubah kedudukan mereka dalam birokrasi menjadi pemilik langsung kekuasaan politik, upayanya melalui aliansi lokal untuk menduduki jabatan politik. *Ketiga*, pengusaha lokal memiliki ambisi politik yang meningkat, mereka cukup puas dengan mendanai secara tidak resmi para kandidat dalam kontestasi politik untuk mendapatkan akses akumulasi privat yang disokong oleh kontrol atas sumber daya dan institusi publik (Hadiz, 2022).

Dengan kata lain, lokalisasi kekuasaan dapat terus menyediakan arena bagi elite lokal memainkan peran utama dalam kontestasi kekuasaan dan kekayaan, tanpa secara signifikan memberdayakan warga lokal. Hal ini yang menjadi dasar bagi terbentuknya aliansi lokal dari kekuatan predatorial dan patronase politik. Desentralisasi yang menjadi pemicu konflik dalam memperebutkan kontrol atas jabatan politik kerap terjadi, terutama di daerah pusat industri yang lebih maju secara ekonomi. Penelitian ini akan merujuk pada pertanyaan bagaimana relasi kepentingan aliansi ekonomi-politik, atau penguasa dan pengusaha lokal di Kota Batu. Ini akan disajikan melalui pola korupsi di Kota Batu yang terjadi pada kasus korupsi Eddy Rumpoko selama dua periode ia menjabat. Juga akan merujuk pada bagaimana sejarah kemunculan kekuasaan politik dan pengusaha lokal di Kota Batu. Artinya, kondisi ini akan menggambarkan relasinya yang menghasilkan perilaku korupsi dari keduanya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif, pendekatan ini berfungsi dalam hal menunjukkan fakta yang terjadi sebenarnya. Penelitian banyak melakukan observasi sesuai dengan objek penelitian, sehingga menarik hubungan sebab akibat dari sebuah penelitian (Nasution, 2023). Pendekatan ini tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti kenyataan lapangan dengan paduan teori tertentu. Selanjutnya menggunakan jenis penelitian deskriptif, sebuah metode yang merupakan suatu pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat, yaitu menjelaskan peristiwa sesuai objek penelitian (Wekke, 2019). Penelitian ini akan mengambil fokus praktik korupsi studi kasus Eddy Rumpoko yang hubungannya dengan relasi kepentingan ekonomi-politik di Kota Batu selama masa rezim Eddy Rumpoko.

Data dikelompokkan menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui putusan pengadilan, observasi dan dokumentasi terhadap kasus korupsi Eddy Rumpoko. Diketahui Eddy terungkap melakukan korupsi 2 (dua) kali selama dua periode kepemimpinannya, kasus pertama terjadi di tahun 2018, kasus selanjutnya terjadi di tahun 2021, kedua kasus tersebut erat dengan relasi aliansi ekonomi-politik, karena berkaitan dengan proyek pengadaan pembangunan di Kota Batu. Diketahui kasus Eddy Rumpoko telah diputuskan oleh pengadilan, sehingga ini bisa menjadi dasar penelusuran data. Putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan yang final dan mengikat, yang didalamnya bermuatan fakta dari objek kasus. Putusan Eddy Rumpoko diantaranya: No.72/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby; No.93/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby; No.31/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal, media, dan dokumen lainnya yang berkaitan. Informasi yang di dapat dari berbagai hasil

kajian, buku, jurnal, atau publikasi lainnya dilakukan seleksi terhadap informasi atas teori yang relevan. Teori yang digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan masalah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Kemunculan Kekuasaan Politik dan Pengusaha Lokal Kota Batu

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa desentralisasi tidak menghilangkan kekuasaan elit lama, mereka yang berkuasa pada Orde Baru berhasil muncul kembali ke panggung politik-ekonomi di Indonesia, sehingga mempengaruhi dinamika kekuasaan lokal (Hadiz, 2022). Kota Batu menjadi daerah otonom yang tergolong baru, terbentuk pada Oktober 2001. Sejak awal memiliki potensi sumberdaya yang mumpuni untuk menjadi wilayah strategis perekonomian. Eddy Rumpoko yang menjabat sebagai Walikota Batu dua periode (2007-2017) adalah rintisan keluarga elit lama yang masih berhubungan erat dengan kekuatan Orde Baru. Ayah dari Eddy Rumpoko yakni Kolonel Sugiyono merupakan Walikota Malang tahun 1973-1983, ia merupakan elit lokal yang dikenal luas oleh masyarakat Kota Malang sebagai *ebes arek Malang* (bapak Kota Malang) (petisi.co, 2020).

Sejak Orde Baru, Eddy juga terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Pemuda Pancasila/PP) dan organisasi pengusaha (Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia/REI). REI adalah salah satu organisasi tempat para pengusaha membangun aliansi dengan kekuasaan politik untuk memajukan bisnis mereka serta mencari akses atas proyek-proyek negara dan patronase (Hadiz, 2022, p. 146). Sedangkan PP adalah organisasi preman binaan Orde Baru yang berperan penting dalam menyediakan jasa kekerasan dan layanan terkait keamanan untuk para elit dalam melancarkan akumulasi ekonomi-politik (Hadiz, 2022, p. 209). Sedangkan Paul Sastro, pengusaha besar yang menguasai sektor industri pariwisata seperti Jatim Park Group dan Sartika Group, sebelumnya adalah teman dekat dari Ayah Eddy Rumpoko. Bahkan disebutkan bahwa Paul Sastro dianggap sebagai anak tiri dari Almarhum Brigjen TNI (Purn) Sugiono, kedekatan ini yang akhirnya diteruskan oleh anaknya.

Dalam konteks Malang Raya, pada Pemilu 1997 perolehan suara secara mutlak dimenangkan oleh Golkar, sedangkan pada Pemilu reformasi 1999 dimenangkan oleh PDIP (Nurjaman, 2019). Eddy Rumpoko yang saat itu menjadi kandidat Walikota Malang gagal terpilih, karena Kota Malang pada saat itu masih menggunakan pola Orde Baru, yakni calon Walikota banyak ditentukan oleh Kodam, Gubernur, dan Pusat-Jakarta (Haboddin & Rozuli, 2023). Saat itu kekuasaan Jakarta meloloskan Suyitno (unsur TNI) sebagai walikota dan Drs. Soetrisno sebagai wakilnya. Akibatnya, terjadi gelombang unjuk rasa dari masyarakat, yang memprotes Suyitno karena dianggap bagian dari Orba dan dari unsur TNI. Dengan demikian beberapa aktor politik di Kota Batu tersebut sebenarnya adalah kalangan elit pengusaha lokal yang mempunyai ambisi politik. Para elit lama tersebut adalah hasil inkubasi dari sistem patronase politik orde baru yang melakukan aliansi lokal untuk menduduki jabatan-jabatan politik di masa reformasi (Hadiz, 2022, p. 145).

Sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah telah meningkatkan dinamika konstelasi politik lokal (Kurniati, 2014). Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2007 dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2007 setelah wafatnya Walikota Batu Imam Kabul, mendapatkan penolakan keras dari masyarakat karena agenda ini dilaksanakan sebelum 100 hari wafatnya Imam Kabul. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu dinilai terlalu berani melanjutkan tahapan Pilkada sepeninggal Walikota sebab harapan masyarakat, KPU menunda pemilu hingga masa berkabung minimal 100 hari, agar punya cukup waktu untuk menentukan pemimpin yang diharapkan. Pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso kemudian memenangkan kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu periode 2007-2012.

Pada pemilu berikutnya tahun 2012 Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso kembali maju sebagai calon petahana. Pada periode ini muncul permasalahan ketika KPU mencoret Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai calon karena hasil penyelidikan KPU menemukan bahwa ijazah Eddy Rumpoko terbukti palsu. Eddy Rumpoko yang tidak terima dengan keputusan KPU akhirnya menggugatnya dan akhirnya menang di pengadilan. Dalam pemilu 2012, Eddy Rumpoko berhasil menang untuk kedua kalinya. Setelah Eddy selesai menjabat di tahun 2017, untuk mempertahankan-

kan sumber daya politik dan ekonomi maka dilanjutkan oleh istrinya, Dewanti Rumpoko. Dewanti sebelumnya merupakan pebisnis dan aktif dalam perkumpulan Dharmawanita, Ia berpasangan dengan Punjul Santoso yang sebelumnya juga berpasangan dengan Eddy. Dewanti menang telak di Pilkada 2017, suara elektoralnya unggul di setiap kecamatan Kota Batu, dengan total suara sah sebanyak 116.124, mereka mendapatkan 51.754 suara (Hartik, 2017). Kemenangannya di Pilkada tahun 2017 tidak bisa dilepaskan dari kondisi relasi ekonomi-politik sebelumnya, Dewanti terbantu dengan relasi Eddy dengan kelompok pebisnis yang sudah mapan, utamanya pengusaha industri pariwisata (Chiquita, 2018).

Penetapan Kota Batu sebagai kota pariwisata pada awalnya dirintis oleh Walikota Batu yang pertama, Imam Kabul, dimana konsep pariwisatanya berbasis pertanian dengan menekankan pada produksi hasil pertanian (Prana et al., 2015). Konsep pengembangan kota wisata menjadi semakin masif pada era kepemimpinan setelahnya Eddy Rumpoko pada 2007 saat *branding* menjadi Kota Wisata Batu (KWB) atau *Shining* Batu. Visi Kota Batu diarahkan untuk menjadi tujuan utama destinasi pariwisata di Jawa Timur. Pada tahap ini, berbagai macam wisata buatan akhirnya tumbuh signifikan *bak jamur di musim hujan*. Pembentukan slogan seperti ini tidak bisa terlepas dari tujuan menghasilkan profit dan fasilitas kota modern (Widianto, 2021).

Jaminan untuk industri pariwisata diperkuat tahun 2013, saat disahkannya Peraturan Daerah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang mengatur rute mengenai pembiayaan untuk mencapai keberlanjutan pembangunan daerah. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Keberadaan peraturan tersebut selain berfungsi sebagai pembangunan sektor pariwisata juga bertujuan memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan pelaku usaha industri pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tata ruang Kota Batu bergantung pada penanaman modal di sektor pariwisata, yang memerlukan reorganisasi ruang dalam pola produksi sistem kapitalisme yang meluas secara geografis (Abdul, 2018).

Para investor diharuskan memberikan laporan secara online mengenai perkembangan penyerapan dana dan alokasinya dimanapun dana tersebut digunakan. Namun faktanya, terdapat permasalahan terkait laporan perkembangan investasi dimana Badan Penanaman Modal (BPM) menemukan informasi tersebut sulit didapat dari investor (Abdul, 2018). Hubungan jaringan politik dan bisnis yang harmonis terlihat dalam sejumlah regulasi yang justru memberikan keringanan pajak, serta izin pendirian sejumlah lokasi pariwisata (Samsuddin et al., 2019). Selain pemerintah dan pengusaha besar, aktor lain yang turut terlibat dalam investasi pembangunan adalah munculnya para makelar tanah yang berperan dalam maraknya jual beli tanah di Kota Batu. Pujiriyani et al. (2014) menyebutnya sebagai *land grabbing*, sebagai bentuk upaya pembebasan lahan melalui pembelian lahan oleh pihak swasta.

Beberapa kasus diantaranya, rencana pembangunan Hotel The Rayja pada 2011 yang berlokasi di kawasan sumber mata air Gemulo (Mardiyono, 2019). Dari rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Batu, kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk pembangunan hotel namun direkomendasikan untuk pembangunan *cottage* atau bungalow. Namun perizinan yang keluar di kantor perizinan terpadu adalah bangunan hotel. Secara lebih lanjut, cara utama yang dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk membuat masyarakat melepaskan tanahnya kepada investor dengan dalih bawah tanah di wilayah tersebut adalah 'lahan tidak produktif' atau tanah marjinal yang perlu dimanfaatkan untuk pembangunan. Tren Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini menunjukkan tidak sedikit bangunan yang terlebih dahulu berdiri, baru kemudian pengurusan izin dilakukan (Susilo, 2021).

Sehingga tidak heran jika pelaku usaha di Kota Batu memberikan persepsi positif ketika masa kepemimpinan Eddy Rumpoko. Bahwa para pelaku usaha menilai bahwa Eddy Rumpoko memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan usaha pada masa dan setelah masa pemerintahannya. Para pelaku usaha mendapatkan kemakmuran finansial dengan kepemimpinan Eddy Rumpoko. Namun berbeda dengan persepsi aktivis lingkungan yang menilai bahwa rezim Eddy Rumpoko menjadi kepala daerah yang buruk di Kota Batu, hingga menyebabkan konflik lingkungan yang dialami oleh masyarakat Kota Batu (Prasetya, 2024).

Seiring menjadi kota pariwisata, hotel di Kota Batu berkembang pesat. Menurut BPS, jumlah hotel Kota Batu meningkat dari tahun 2014 di mana jumlahnya kisaran 500 hotel menjadi 1.345 hotel pada tahun 2019. Sehingga mempengaruhi pendapatan daerah melalui pajak dari hotel, sektor ini merupakan pendapatan terbesar setelah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun menurut Hanif dan Fadil (2023), tidak ada pengaruh pembangunan hotel terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, ia meninjaunya melalui ukuran rata-rata lamanya tamu menginap dan tingkat penghunian kamar hotel, sedangkan sektor pertanian kehilangan lahannya karena alih fungsi lahan untuk hotel.

Melalui penelusuran historis, dapat diidentifikasi bahwa baik elit politik maupun ekonomi di Kota Batu mempunyai hubungan yang saling terkait dengan Orde Baru. Letak perbedaannya, di masa Orde Baru mereka tidak dapat dengan leluasa mendapatkan akses terhadap politik karena tidak mempunyai jaringan patronase langsung dari pusat kekuasaan. Eddy Rumpoko sebelumnya telah tergabung dalam sejumlah organisasi pengusaha dan kemasyarakatan, diinkubasi dalam sistem politik yang sentralistik, mendapatkan kemewahaan setelah kran reformasi dibuka. Menguatnya lokalitas dalam bentuk politik lokal memberikan kesempatan bagi elit-elit lama secara lebih leluasa untuk berkontestasi dalam ranah lokal (Hadiz, 2022, p. 3). Namun, proses berjalannya kontestasi, layaknya Eddy Rumpoko saat menjabat Walikota Batu memiliki watak khas, seperti gaya kepemimpinan yang berkaitan erat dengan latar belakangnya dulu. Eddy Rumpoko juga cukup lama membangun basis ekonomi sebagai pengusaha, memiliki watak khas yang terus dipertahankan yakni akumulasi kekayaan dengan tetap menyesuaikan karakteristik potensi ekonomi di daerah.

### Korupsi Eddy Rumpoko, Kepentingan Aliansi Ekonomi-Politik Kota Batu

Eddy Rumpoko sebagai Walikota terbukti terlibat dalam kasus korupsi, ia terjerat kasus korupsi dua kali selama periode kepemimpinannya (2007-2017). Kasus pertama terungkap di tahun 2018, dalam kasus tersebut, Eddy terbukti menerima suap dengan uang Rp. 295 juta dan mobil senilai Rp 1,6 miliar, upaya suap terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair, ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Filipus Djap sebagai pihak swasta yang mendapatkan keuntungan terkait pengadaan (Gatra, 2019). Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya memvonis Eddy Rumpoko selama 3 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Eddy mengajukan banding hingga kasasi, putusan banding di Pengadilan Tinggi memperberat vonis menjadi 3,5 tahun penjara, putusan kasasi oleh Mahkamah Agung semakin memperberat menjadi pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp 200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan (Gatra, 2019).

2012	•Hubungan awal Filipus Djap dan Eddy Rumpoko
2016	•Eddy mendapatkan mobil (senilai Rp 46,8 miliar) dan uang Rp 295 juta dari Filipus Djap •Eddy menunjuk Edi Setiawan untuk mengatur proses lelang
2017	•Filipus Djap mendapatkan banyak proyek pengadaan dari Pemkot Batu
2018	•Eddy dan Filipus menjadi terpidana •Eddy pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta
2022	•Pengembangan kasus •Terbongkarnya gratifikasi selama 2007-2017 dari banyak pengusaha lokal, total Rp 46,8 miliar •Eddy pidana 7 tahun dan denda Rp 500 juta

Figure 1. Kronologi singkat kasus suap dan gratifikasi Eddy Rumpoko

Di tahun 2022, Eddy divonis kedua kalinya atas kasus korupsi, ia terbukti terlibat dalam kasus gratifikasi sebesar Rp 46,8 miliar, terkait perizinan untuk sejumlah pengusaha saat menjabat (selama 2007-2017). Kasus ini sebagai pengembangan dari kasus sebelumnya. Putusan pengadilan Tipikor Surabaya memvonis Eddy Rumpoko 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara (Faizal & Susanti, 2022). Eddy sempat melakukan pengajuan banding dan kasasi, namun keduanya ditolak pengadilan sehingga keberlakuan vonis tetap dengan putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya (Setiawan, 2023). Melalui kasus korupsi beruntun Eddy Rumpoko, semakin mempermudah untuk melihat fakta relasi kepentingan antara ekonomi dan politik di Kota Batu.

Hubungan Eddy dengan Filipus Djap terjalin sejak lama, lebih tepatnya tahun 2012 ketika Filipus Djap mendirikan hotel di Kota Batu, setelah itu, Filipus Djap semakin mudah dalam ekspansi bisnisnya. Di tahun 2016, Eddy mendapatkan hadiah mobil dan uang dari Filipus Djap, ini selanjutnya akan dipertukarkan dengan pengadaan proyek pekerjaan. Eddy mengarahkan secara sepihak kepada Dinas untuk memenangkan Filipus dalam proyek lelang, ia menunjuk Edi Setiawan (seorang birokrat) untuk mengatur proses lelang yang akan dimenangkan untuk Filipus. Edi Setiawan berperan sentral dalam kasus ini, awalnya ia diangkat oleh Eddy Rumpoko sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kota Batu. Kemudian secara definitif Edi Setiawan diangkat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan, ini untuk mempermudah proses lelang. Edi Setiawan juga mendapatkan bagian sebesar 2% dari nilai kontrak, sementara Eddy Rumpoko mendapatkan 10%. Sejak itu, Filipus Djap melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa memenangkan lelang 7 (tujuh) pengadaan barang di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017.

**Tabel 1.** Proyek pengadaan yang dimenangkan oleh Filipus Djap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Nama Paket	Pagu Anggaran	Pemenang
Dinas Pendidikan	Pengadaan Batik Siswa SD	Rp 1.204.740.000	CV. Amarta Wisesa
Dinas Pendidikan	Pengadaan Batik Siswa SPM	Rp 632.100.000	CV. Amarta Wisesa
Dinas Pendidikan	Pengadaan Batik Siswa SMA/SMK	Rp 657.370.000	CV. Amarta Wisesa
BPKAD	Meubelair Block Office	Rp 5.010.785.000	PT. Dailbana Prima
Dinas Pendidikan	Pengadaan Almari Sudut Baca SD Negeri	Rp 2.128.000.000	CV. Amarta Wisesa
Dinas Pendidikan	Pengadaan Seragam SMA/MA/SMK	Rp 862.372.500	CV. Amarta Wisesa
Dinas Pendidikan	Belanja Seragam SMP/MTs	Rp 728.612.500	CV. Amarta Wisesa

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby

Selain aliansi ekonomi-politik, peran penting juga dipegang oleh golongan birokrat, kelompok ini digunakan untuk instrumen melancarkan aliansi kepentingan pokok. Dari kasus Eddy, penunjukan Edi Setiawan sebagai Kepala Bidang Pengadaan adalah upaya persekongkolan untuk melancarkan kepentingan tersebut, sekalipun Edi Setiawan mendapatkan keuntungan tersendiri dari siasat tersebut, namun persentasenya relatif kecil, artinya birokrat tetap menjadi sumber daya institusi untuk kepentingan aliansi ekonomi-politik, kepentingan keduanya yang menjadi pokok. Namun, kasus ini sebenarnya hanyalah mengungkapkan bagian kecil, ketika proses pengembangan kasus, banyak ditemukan kepentingan aliansi ekonomi-politik yang lebih besar.

Kekayaan Eddy Rumpoko selama menjabat meningkat drastis secara tidak wajar, dari tahun 2007-2012 meningkat 35%, yang awalnya Rp 6.980.426.022 menjadi Rp 9.416.895.815, ini di periode awal dia menjabat. Di periode selanjutnya, dari tahun 2012 hingga 2017 juga semakin meningkat drastis, bahkan mencapai 99,6%, dari Rp 9.416.895.815 meningkat menjadi Rp 16.436.612.628 (Samsuddin et al., 2019). Menurut Samsuddin, meningkatnya kekayaan Eddy tidak bisa lepas dari hubungannya dengan pelaku bisnis khususnya bidang industri pariwisata yang dimonopoli oleh segelintir orang, Eddy memberikan proteksi berupa kemudahan izin usaha. Disini muncul nama seperti Paul Sastro, pengusaha besar yang memonopoli industri pariwisata (melalui Jatim Park Group), bisnis Sastro berkambang ditahun-tahun berikutnya; Museum Satwa, Batu Night Spectacular (BNS), Batu Secret Zoo, Eco Green Park, Museum Angkut, Museum Tubuh, Predator Fun Park, dan industri hotel (Samsuddin et al., 2019).

Sebenarnya bukan hanya Paul Sastro yang mendapatkan keuntungan di masa kepemimpinan Eddy Rumpoko. Selama Eddy menjabat, ia banyak mengatur proses lelang atas paket pekerjaan yang ada untuk dimenangkan kepada para pengusaha lokal tertentu yang dekat dengannya. Hal ini terlihat dari proses pengembangan kasusnya tahun 2022, selama dua periode ia menjabat sebagai Walikota Batu.

**Tabel 2.** Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi Eddy Rumpoko selama menjabat dari 2007-2017

Aktor (Inisial)	Perusahaan	Nominal Gratifikasi
(PS)	JTP Group	Rp 3.109.050.000
(MZI)	CV. SG	Rp 8.100.000.000
(Y)	PT. TMT	Rp 2.280.000.000
(FT)	PT. BM	Rp 3.520.000.000
(AS)	CV. KM	Rp 2.380.000.000
(IB)	PT. AP	Rp 4.750.000.000
Tidak diketahui	PT. LNJ	Rp 600.000.000
(DCH)	PT. BRE	Rp 150.000.000
(HP)	PT. AMT	Rp 100.000.000
(IG)	Pengusaha hotel	Rp 200.000.000
(EA)	PT. KSDW	Rp 100.000.000
(AAS)	Mantan Kepala Dinas	Rp 100.000.000
Tidak diketahui	MRC. BC	Rp 300.000.000
(DVS)	AC	Rp 1.000.000.000
(HW)	HA	Rp 400.000.000
(AFI)	CH	Rp. 500.000.000
(DKG)	Tidak diketahui	Rp. 1.000.000.000
Tidak diketahui sumbernya	Tidak diketahui	Rp 18.284.181.400
Total Gratifikasi		Rp.46.873.231.400,00

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan putusan No.93/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby

Secara keseluruhan, pengusaha yang terlibat dalam kasus Eddy Rumpoko adalah pengusaha lokal yang bergerak dalam bidang industri hotel, villa, perumahan, pariwisata, dan konstruksi bangunan. Hasil dari transaksi atas apa yang telah diberikan oleh pengusaha, Eddy Rumpoko menunjuk pihak tertentu dari kalangan birokrat untuk melancarkan proses lelang agar dimenangkan oleh pengusaha terdekatnya. Banyak proyek yang telah melalui proses lelang dan dinyatakan sebagai pemenang, namun oleh Eddy Rumpoko meminta dibatalkan karena bukan pihak pengusaha yang diinginkannya. Eddy bahkan pernah membentuk peraturan tidak tertulis yang mewajibkan tanda tangannya ketika penerbitan surat pencarian. Ia mengarahkan kepada pejabat di Dinas Perumahan maupun Dinas Bina Marga dan Pejabat Unit Layanan Pengadaan untuk mengumpulkan uang yang sumbernya dari pengusaha yang mengerjakan proyek.

Dalam kasus Eddy Rumpoko, temuan penting lainnya menunjukkan bahwa sebagian aliran uang digunakan untuk kebutuhan kampanye istrinya, yakni Dewanti Rumpoko. Diketahui Dewanti merupakan mantan Walikota Kota Batu yang menjabat sejak menang di Pilkada tahun 2017, ia menggantikan suaminya dalam kepemimpinan Kota Batu. Dari putusan kasus Eddy Rumpoko, nama istrinya selalu muncul sebagai penerima manfaat yang digunakan untuk kepentingan politiknya.

**Tabel 3.** Pemberi gratifikasi (dari pengusaha) yang berkaitan dengan pendanaan Pilkada 2017

Aktor/Pemberi (Inisial)	Nominal Gratifikasi	Mendapatkan Proyek
(Y)	Rp 2.280.000.000	1. Renovasi rumah dinas Walikota Batu 2. Pembangunan Pasar Kota Batu 3. Pengadaan jaringan Block Office 4. Pembangunan hanggar Pemadam Kebakaran 5. Pekerjaan interior ruangan kantor Pemkot Kota Batu
(MZI)	Rp 8.100.000.000	1. Pembangunan Gedung Olah Raga Kompleks Stadion Brantas. 2. Pembangunan Guest House Mahasiswa Batu. 3. Pembangunan Taman Kantor Pemerintah Kota Batu ( <i>Block Office</i> )

Data diolah peneliti berdasarkan putusan No.27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dan No 93/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby

Menurut kajian Intrans Institute, Pilkada 2017 di Kota Batu memang menjadi ajang kontestasi untuk meneguhkan kepentingan aliansi ekonomi-politik (oligarki), keduanya hasil dari saling menyokong kepentingan satu sama lain (Institute, 2017). Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menemukan pelanggaran pemilu dalam Pilkada 2017 oleh pasangan Dewanti Rumpoko, dengan memobilisasi aparat desa dan politik uang sebesar Rp 100 ribu untuk setiap warga desa (Aminudin & Wahyudiyanta, 2017). Promosi Dewanti Rumpoko sebagai salah satu kandidat Walikota masih berafiliasi dengan keberadaan Eddy Rumpoko (Supriyanto, 2023). Berbagai macam cara untuk melakukan mobilisasi suara kepada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan politik (Adzmy & Disyacitta, 2018). Hal ini menjadi menarik karena PKK sebagai organisasi korporatis negara yang idealnya netral secara politik. Berbanding terbalik dengan upaya sebelumnya yang berhasil, mobilisasi suara dari para supporter klub sepak bola juga diupayakan namun gagal.

Praktik korupsi dalam pelaksanaan anggaran di Kota Batu menunjukkan bahwa elit politik telah memanfaatkannya sebagai arena negosiasi dan transaksi politik yang memungkinkan mereka memobilisasi, memonopoli, dan mengarahkan sumber daya kebijakan untuk menguntungkan diri mereka dan sekutunya. Dalam konteks korupsi Kota Batu, peran birokrat begitu penting sebagai mediator antara pengusaha dan pimpinan daerah (Salahudin et al., 2020). Relasi kepentingan aliansi ekonomi-politik ini merupakan hubungan seperti yang terbentuk dari kepentingan kelas berdasarkan kepemilikan atas akses alat produksi (pengusaha) dan sumber daya materil lainnya, dengannya akan mengarahkan bekerjanya institusi sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi arena kontestasi semata-mata untuk kepentingan akumulasi kapital (keuntungan) (Mudhoffir et al., 2020).

Terdapat beberapa modus upaya Eddy Rumpoko dalam melanggengkan praktik korupsi, yang dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yakni gratifikasi aktif, gratifikasi pasif, serta manipulasi aturan. Gratifikasi aktif yakni menarik Investor dengan menawarkan kemudahan proses perizinan serta pembagian fee atas proyek. Eddy juga mengumpulkan tim sukses dan memerintahkan bawahannya untuk mengatur dan memenangkan proses lelang proyek pengadaan barang dan/atau jasa di Pemkot Batu. Gratifikasi pasif yakni para pengusaha yang meminta Eddy Rumpoko untuk memberikan keringanan atau bahkan memutihkan kewajiban membayar pajak. Upaya manipulasi aturan dilakukan Eddy Rumpoko dengan menyampaikan peraturan tidak tertulis melalui kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mewajibkan adanya nota dinas persetujuan Eddy selaku Walikota Batu dalam setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi daftar kegiatan pekerjaan yang akan diajukan pencairannya. Kemudian barulah SPM tersebut dapat diajukan ke BKD (Badan Keuangan Daerah) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Disebut manipulasi, karena ada pemaksaan instrumen hukum padahal tidak ada acuan regulasinya.

Kemudian melalui pemaksaan terhadap Surat Keputusan (SK), seperti yang dilakukan Eddy ketika berupaya untuk memproteksi bisnis Paul Sastro. Hal ini menyangkut pemberian izin wisata Predator Fun Park tahun 2014, berdirinya melalui PT. Bhakti Batu Sejahtera -perusahaan yang dimiliki oleh Paul Sastro. Eddy Rumpoko meresmikan bisnis tersebut tanpa izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mensiasatinya, Eddy akhirnya mengeluarkan SK No:188.45/210/KEP/422.012/2015 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan wisata alam penangkaran buaya dan ikan di Desa Tlekung, Junrejo. SK tersebut pada dasarnya bermasalah, karena lahan yang digunakan diperuntukkan untuk pertanian bukan wisata. Kepentingan lokal predatoris yang melembaga telah mampu mengambil alih agenda reformasi pemerintahan yang baik, termasuk diantaranya terkait desentralisasi kekuasaan, untuk mempertahankan dominasi sosial dan politik (Hadiz, 2022, h 4).

Melalui relasi sosial seperti itu, perilaku korupsi bukan disebabkan oleh pilihan rasional individu yang rakus dan tidak bermoral, atau akibat tidak efektifnya birokrasi dan tidak bekerjanya aturan tertentu. Perubahan tata pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (*good governance*) di era Reformasi, terbukti insignifikan dalam melahirkan pemerintahan yang lebih bersih (anti-korupsi). Desentralisasi justru menjadi arena baru yang mereplikasi sistem patronase serta praktik predatorisme yang tertanam sejak Orde Baru, yang pada intinya bertujuan mengakumulasi kapital dan kekuasaan (Hadiz, 2022, p 147). Hal ini akan mengakibatkan keter-

putusan politik dengan kehendak masyarakat, sehingga biaya politik menjadi mahal. Kebutuhan biaya politik yang mahal mendorong para politisi mempertahankan pola hubungan patronase dengan para pengusaha, sementara pengusaha juga membutuhkan koneksi politik untuk menjamin kelancaran bisnisnya.

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut: *Pertama*, Desentralisasi lokal tidak semata-merta menjamin bersihnya tata kelola pemerintahan, inilah yang terjadi di Kota Batu. *Kedua*, Elit lokal di Kota Batu, khususnya Eddy Rumpoko muncul sebagai elit yang memiliki sejarah melalui jaringan patronase yang berkaitan erat semasa Orde Baru. *Ketiga*, kepentingan aliansi ekonomi-politik terlihat semakin menonjol sejak masa kepemimpinan Eddy Rumpoko, dengan kebijakannya yang pro terhadap pengusaha lokal, khususnya untuk industri hotel dan pariwisata. *Keempat*, Pengusaha yang terlibat dalam kasus Eddy Rumpoko sejak 2007 hingga 2017 adalah pengusaha lokal yang rata-rata bergerak dalam bidang industri pariwisata, hotel, villa, perumahan, dan konstruksi bangunan. Mereka mendapatkan kemudahan berbisnis dengan Eddy memobilisasi birokrat dan manipulasi aturan, sementara trah politik keluarga rumpoko mendapatkan dukungan modal dari pengusaha. Kondisi tersebut sebagai manifestasi dari transaksi kepentingan ekonomi-politik antar keduanya.

### Referensi

- Abdul, K. (2018). Tourism and development: Land acquisition, achievement of investment and cultural change (Case study tourism industry development in Batu City, Indonesia). *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 21(1), 253. <https://doi.org/10.30892/gtg.21120-285>
- Adzmy, M. F., & Disyacitta, F. (2018). The Indonesian family welfare guidance programme (PKK) and the revitalisation of corporatist state organisations: A case study of the mobilisation of support for Dewanti Rumpoko in the 2017 Batu Municipal Election. *PCD Journal*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/pcd.31291>
- Afala, L. M. (2017). Pasang surut reformasi birokrasi dalam transisi demokrasi Indonesia. *Jurnal Transformative*, 3(1), 15–39.
- Aminudin, M., & Wahyudiyanta, I. (2017). *KIPP ungkap dugaan politik uang pada Pilkada Kota Batu*. Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3420134/kipp-ungkap-dugaan-politik-uang-pada-pilkada-kota-batu>
- Annur, C. M. (2022). *KPK tangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga Oktober 2022*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>
- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan jaringan patronase: dinamika kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>
- Ayu O, F., Mardiyono, M., & Wijaya, A. F. (2019). Governmentality: cases of the rayja hotel conflict construction permit, Bumiaji Sub-District, Batu. *REFORMASI*, 9(2), 104. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1451>
- Chiquita, M. (2018). *Struktur oligarki Kota Batu (Relasi pengusaha dan pemerintah di Kota Batu)* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10611/>
- Faizal, A., & Susanti, R. (2022). *Kasus gratifikasi Rp 46,8 miliar, Mantan Wali Kota Batu kembali divonis 7 tahun penjara*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/22/205030078/kasus-gratifikasi-rp-468-miliar-mantan-wali-kota-batu-kembali-divonis-7>
- Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan publik dalam serial kasus korupsi kepala daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 345–358. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>
- Gatra, S. (2019). *MA perberat vonis mantan Wali Kota Batu jadi 5,5 tahun penjara* (S. Gatra (ed.)).

- Tempo.Co. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/07/17081461/ma-perberat-onis-mantan-wali-kota-batu-jadi-55-tahun-penjara>
- Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813>
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2023). *Pilkada serentak Jawa Timur*. UB Press. <https://ubpress.ub.ac.id/?p=4441>
- Hadiz, V. R. (2022). *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pasca otoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hanif, Z. M., & Fadil, F. (2023). Pengaruh perkembangan sektor pariwisata, IPM, tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Kota Batu tahun 2003-2020. *Journal of Development Economic and Sosial Studies*, 2(1). <https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/107>
- Hartik, A. (2017). *Rekapitulasi KPU Kota Batu: Istri petahana menang telak*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2017/02/23/16225501/rekapitulasi.kpu.kota.batu.istri.petahana.menang.telak>
- Kholik, S. (2017). Penerapan otonomi daerah dalam desentralisasi korupsi di daerah. *Yustitia*, 3(2), 123–133. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v3i2.50>
- KPK. (2023). *10 pertanyaan tentang korupsi dan penjelasannya*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230721-10-pertanyaan-tentang-korupsi-dan-penjelasannya>
- Kurniaty, R. (2014). Local elites and public space sustainability: The local elite roles in the presence and usage of public space in Malang Raya, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 506–515. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.063>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Pelaku tindak pidana korupsi terbesar dari swasta*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/25/pelaku-tindak-pidana-korupsi-terbesar-dari-swasta>
- Mudhoffir, A. M., Sangadji, A., Pontoh, C. H., Riyanto, G., Suwandi, I., Widoyoko, J. D., Supriatma, M., Ridha, M., & Robet, R. (2020). *Oligarki: Teori dan kritik*. Marjin Kiri.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harva Creative.
- Nurjaman, A. (2019). *Partai dan Pemilu: Perilaku politik di aras lokar pasca Orde Baru*. UMM Press.
- Oley, J. D. B., & Adi, Y. S. (2018). Vulnerabilities of Indonesia's extractive industry to illicit financial flows. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 75–98. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.301>
- Prana, A., Sumiantoro, S., & Henkus, S. (2015). *Pokja pendiri Kota Batu*. Gunung Samudera.
- Prasetya, B. A. (2024). Comparison of Eddy Rumpoko's leadership for business actors and activists (Study in city communities in 2023). *PERSPEKTIF*, 13(1), 10–17. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10189>
- Pujiriyani, D. W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Ariin, M. B. (2014). *Land grabbing: Bibliografi beranotasi*. STPN Press. <https://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Land-Grabbing.pdf>
- Redaksi. (2020, October 5). Mengenang Ebes Sugiyono Bapak'e Wong Malang 10 tahun jabat wali kota era'80an. *Petisi.Co*. <https://petisi.co/mengenang-ebes-sugiyono-bapake-wong-malang-10-tahun-jabat-wali-kota-era80an/>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Mutiarin, D. (2020). Elite capture of budget corruption in three Indonesian regions. *Public Policy and Administration*, 19(2). <https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-2-14>
- Samsuddin, H., & Bunga, N. (2017). *Research release: Kota Batu dalam cengkeraman oligarki*. Transisi.Org. <https://transisi.org/release-research-kota-batu-dalam-cengkeraman-oligarki/>

- Samsuddin, H., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2019). Membongkar relasi kekuasaan oligarki di Kota Batu : Studi kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberian keringanan pajak dan korupsi kebijakan PT BWR. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 210–227. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.511>
- Setiawan, A. D. (2023). *Kasasi kembali ditolak, ER batal hirup udara bebas*. Batu Network. <https://batu.jatimnetwork.com/batu/9988327137/kasasi-kembali-ditolak-er-batal-hirup-udara-bebas>
- Setiyono, B. (2017). Memahami korupsi di daerah pasca desentralisasi: Belajar dari empat studi kasus. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62>
- Supriyanto, D. (2023). Dynastic politics and political party recommendation patterns in the 2017 Batu City regional head election. *The Internasional Journal of Politics and Sociology Research*, 11(1). <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v11i1.68>
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran demokrasi tata kelola SDA: Penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi civil society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>
- Susilo, A. A. (2021). *Kota Batu dalam bayang-bayang gentrifikasi*. Detik News. <https://news.detik.com/kolom/d-5807467/kota-batu-dalam-bayang-bayang-gentrifikasi>
- The Data Team. (2016). *Comparing crony capitalism around the world: The Economist's crony-capitalism index*. The Economist. <https://www.economist.com/graphic-detail/2016/05/05/comparing-crony-capitalism-around-the-world>
- Triguswinri, K. (2021). Good governance as primary program for the neo-liberalism agenda. *Sosial Science Studies*, 1(3), 129–144. <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/238>
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Gawe Buku.
- Widianto, H. W. (2021). Perubahan ruang, gentrifikasi, dan akumulasi kapital. *Jurnal Prisma*, 40. <https://www.prismajurnal.com/article/perubahan-ruang-gentrifikasi-dan-akumulasi-kapital/>
- Zabar, T., & Topan, A. (2022). *Korupsi kepala daerah*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>
- Zuhad, A. (2021). *Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu kembali terlibat kasus korupsi rp46,8 miliar* (I. Firdaus (ed.)). Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/regional/230381/eddy-rumpoko-mantan-wali-kota-batu-kembali-terlibat-kasus-korupsi-rp46-8-miliar>